



## PROSTITUSI DI SURABAYA PADA AKHIR ABAD KE-19

**Moch. Dimas Galuh Mahardika**

*dimas.dg20@gmail.com*

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

*Received: 24 May 2019*

*Revised: 4 June 2020*

*Accepted: 4 June 2020*

*Published: 30 June 2020*

### Permalink/DOI

[10.17977/um020v14i12020p22](https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p22)

Copyright © 2019, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

### ABSTRACT

*Prostitution is one of the mediums often utilized by men to wreak its sexual passions. For European officials working in the Indian land, they were forbidden to bring families during their service in the Indies. Prostitution flourished in major cities during the Dutch East Indies. Surabaya, which was at that time a large city with its port which became a place for the practice of prostitution. The connoisseurs of these prostitutes apart from Europeans also contained the middle-class people of the indigenous peoples. Prostitutes in the rent of brothels are among the people of the indigenous Peoples, Europe, China and Japan. Prostitution spread all over the place in Surabaya, causing the rise of genital diseases.*

### KEYWORDS

*Prostitute, genital disease*

### ABSTRAK

Prostitusi merupakan salah satu media yang sering dimanfaatkan oleh kaum pria untuk melampiaskan gairah seksualitasnya. Terlebih para pegawai Eropa yang bekerja di tanah Hindia, mereka dilarang membawa keluarga selama bertugas di Hindia. Prostitusi berkembang di kota-kota besar pada masa Hindia-Belanda. Surabaya yang pada saat itu merupakan kota besar dengan pelabuhannya yang menjadi tempat penjamuran praktik prostitusi. Penikmat para pelacur ini selain dari orang-orang Eropa juga terdapat orang-orang kelas menengah dari kaum pribumi. Pelacur-pelacur yang di sewakan rumah-rumah bordil diantaranya adalah dari orang-orang dari kaum Pribumi, Eropa, Cina dan Jepang. Prostitusi merebak di seluruh penjuru tempat di Surabaya sehingga menyebabkan maraknya penyakit kelamin.

### KATA KUNCI

Prostitusi, Pelacur, Penyakit Kelamin.

---

## PENDAHULUAN

Kehidupan perkotaan yang individual, mengedepankan kompetisi seringkali melahirkan permasalahan sosial tersendiri seperti, kriminalitas, prostitusi, kemiskinan, urbanisasi, pengangguran serta permasalahan sosial lain. Masalah-masalah sosial yang muncul di perkotaan ini menuntut pemerintah kota untuk berbuat sesuatu agar kehidupan perkotaan menjadi lebih aman dan nyaman. Lembaga-

lembaga sosial dan fasilitas-fasilitas yang mendukung kesejahteraan sosialpun mulai diupayakan (Margana & Nursam, 2010: 9). Tahun 1870 oleh para ahli perkotaan Indonesia dianggap sebagai titik awal perkembangan kota-kota di Indonesia. Sejak periode ini sebagian kota-kota dikembangkan menjadi kota modern dengan segala fasilitas pelengkapannya. Periode ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Agraria 1870 yang menjadi simbol liberalisasi ekonomi di Indonesia (Nas, 2007: 305).

Sejak Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada 1906, kota ini dengan cepat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara fisik kota Surabaya mengalami perluasan dalam segala arah, khususnya ke arah selatan. Perluasan kota ini salah satunya merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kota Surabaya yang telah berkembang pesat sejak era liberalisasi ekonomi pada 1870 telah menjadi salah satu tujuan utama para pendatang dari pedesaan yang ingin mengadu nasib. Akibat dari banyaknya investor asing yang masuk dan membuka lahan-lahan industri di berbagai wilayah, maka semakin banyak orang yang tinggal di kota-kota besar maupun kecil untuk mencari penghidupan dari perekonomian perkotaan (Ingelsson, 2013: 1).

Sebagian dari mereka menganggap bahwa peluang besar sedang menanti dengan segala kemungkinannya saat mereka berani untuk mengadu nasib di kota-kota itu. Akan tetapi banyak dari mereka yang lupa bahwa mereka belum memiliki keahlian yang notabene dibutuhkan perusahaan, dengan cara dan sistem kerja yang “nyaman”. Maka saat mereka tiba di kota perantauan, yang mereka temui adalah pekerjaan kasar sebagai kuli, buruh pabrik dan pekerjaan “otot” lainnya. Belum lagi jika mereka mendatangi kota-kota pelabuhan besar seperti Semarang dan Surabaya misalnya. Secara otomatis mereka akan bekerja di sektor-sektor yang tidak jauh dari kultur kota itu, sebagai kota pelabuhan--buruh pelabuhan. Salah satu lokasi yang favorit bagi para pendatang di sekitar kota Surabaya adalah pelabuhan Tanjung Perak di utara kota. Sebagian besar tenaga kerja, dari sekitar sepuluh ribu tenaga kerja mayoritas di pelabuhan Surabaya adalah orang-orang dari Madura (Ingleson, 2004: 4).

Secara umum, modernitas menjangkau hingga bidang kehidupan yang sehari-hari bersifat paling pribadi seperti perilaku seksual (Sztompka, 2008: 86). Perilaku seksualitas merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Menurut Faucault (1997: 113), cerminan dari kenikmatan sebagai sesuatu yang mendestabilisasi dan mengancam tidak hanya bagi tatanan politik dan budaya tetapi juga semua jenis tatanan, baik tatanan suci atau profan, tatanan tubuh dan bahkan tatanan teori. Dalam hal ini dikaitkan seks sebagai bagian dari kekuasaan yang dipahami sebagai hubungan kekuatan yang imanen. Selain itu karena kebutuhan hiburan dan kecenderungan perilaku seks tersebut merupakan esensi manusia dalam pemaknaan hidupnya sebagai pelampiasan dari rutinitas, kejenuhan, konflik diri, dan gaya hidup.

Daya tarik kota, faktor kemiskinan, sistem monetisasi, serta penyimpangan seksual dikalangan masyarakat telah melahirkan aktivitas prostitusi yang sulit dihindarkan. Kata prostitusi berasal dari bahasa latin “*prostituo*”, yang diartikan sebagai perilaku (biasanya)

perempuan terang-terangan atau tersembunyi berbuat zina dengan imbalan uang atau barang berharga lainnya (Soedjono, 1977: 14). Dalam perkembangannya prostitusi berkembang pesat kala itu bahkan hingga saat ini. Hal ini terjadi karena seksualitas menjadi sebuah kebutuhan biologis manusia. Selain itu adanya kemiskinan membuat para wanita tuna susila terpaksa melakukan prostitusi, sedangkan saat itu para tentara Belanda yang jauh dari rumah dan jauh dari istri terpaksa menggunakan jasa wanita tuna susila ini sebagai pelampiasan biologisnya, sehingga kebudayaan ini sulit dihilangkan bahkan oleh pemerintah, akhirnya dilegalkan.

Surabaya pada era 1800-an memiliki pelabuhan terbuka di luarnya, dimana kapal pengangkut yang berlayar di lautan dapat mengisi dan membongkar muatan langsung di dermaga, sementara pelabuhan sebelah dalam melayani kapal-kapal layar yang sibuk di dalam jalur perdagangan antarpulau (Ingelson, 2013: 3). Kenyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Surabaya sudah mulai melakukan transisi dari budaya agraris berganti menjadi kota industri (Dick, 2000: 177). Surabaya sebagai kota industri tentunya membutuhkan banyak serapan tenaga kerja, yang kemudian akan memunculkan masalah-masalah baru pada wilayah industri itu sendiri. Maka kondisi ini menarik minat penulis untuk mengamati secara spesifik salah satu permasalahan yang muncul di kota Surabaya, secara spesifik yang berkaitan dengan prostitusi. Maka dengan segala sumber yang didapatkan, penulis mencoba untuk menulis sebuah kajian tentang geliat "Prostitusi di Surabaya Abad Ke-19".

## **METODE**

Penulisan artikel yang membahas tentang prostitusi di Surabaya akhir Abad ke-19 ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode tersebut digunakan mengingat sumber-sumber yang digunakan adalah buku-buku yang tersedia dan siap akses di dalam lingkungan persputakaan. Zed (2014: 4) memaparkan ciri-ciri utama studi kepustakaan: (a) berhadapan langsung dengan teks; (b) bersifat siap pakai; (c) sumber yang digunakan pada umumnya adalah sumber sekunder. Selain buku, penulis juga menggunakan beberapa jurnal yang relevan dengan pembahasan pada tulisan ini.

Sebelum mengumpulkan sumber yang tersedia di perpustakaan, penulis terlebih dahulu menentukan tema yang akan dibahas dalam tulisan ini. Sehingga kemudian penulis dapat mencari sumber-sumber yang dianggap sesuai untuk melengkapi perspektif di dalam tulisan ini. Sumber yang telah terkumpul baik berupa buku maupun jurnal, kemudian dibaca dan diamati untuk mencari pokok-pokok pikiran yang tepat supaya narasi yang dibangun di dalam tulisan ini lengkap dan dapat memberikan informasi seputar aktifitas prostitusi di Surabaya akhir Abad ke-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Munculnya Prostitusi di Surabaya

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya biasa dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain) yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan (Dewi, 2012: 81). Pada masa kolonial prostitusi berpusat di pelabuhan-pelabuhan besar serta di kota Garnisun. Di Surabaya semua wanita tuna susila dipaksa tinggal di satu atau dua kampung yang terpisah (Sugiati, 2008: 7). Di daerah-daerah bumiputera terdapat perbedaan atas wanita tuna susila yaitu wanita tuna susila yang biasa dan terdapat pula ronggeng (penari atau penyanyi perempuan) akan tetapi tidak semua ronggeng adalah pelacur (Boomgard, 2004: 281).

Penyebab munculnya prostitusi, sebagian besar dikarenakan oleh adanya desakan pada keadaan ekonomi. Selain karena desakan ekonomi, penyebab lain dari munculnya prostitusi juga dapat dikaitkan dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia (Bonger, 1954: 108). Menurut Ingleson dalam (Margana & Nursam, 2010: 136-137) mengatakan bahwa salah satu penyebab maraknya prostitusi adalah kondisi masyarakat kota kolonial itu sendiri. Kota merupakan tempat yang pertama kali menerima berkah dari keberhasilan ekspor produk-produk primer Belanda. Keberhasilan itu telah memicu pertambahan jumlah populasi Eropa, terutama perjaka di kota-kota di Jawa. Peningkatan itu disertai dengan peningkatan jumlah hotel, bordil dan klub-klub malam. Tempat-tempat itu menjadi lahan subur praktek prostitusi yang kemudian meluas hingga ke kampung dan warung remang-remang.

Banyaknya wanita yang terjun dalam pelacuran pada dasarnya dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Faktor yang menjadi pendorong wanita menjadi wanita tuna susila berasal dari faktor individual yang terbagi dalam berbagai macam penyebab seperti ekonomi, psikologi, dan ketidaktahuan, serta faktor sosial yang merupakan pengaruh dari lingkungan fisik dan lingkungan alam seorang wanita (Bonger, 1954: 108). Sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan kegiatan prostitusi pada 1874, pelaku prostitusi bebas menjalankan aktivitasnya. Sejak peraturan tersebut dibuat, kontrol terhadap perilaku prostitusi menjadi lebih intensif. Artinya, pelaku prostitusi tercatat dalam register petugas keamanan dan secara berkala mendapatkan pemeriksaan dokter untuk mencegah meluasnya berbagai jenis penyakit kelamin (Amini, 2003: 109).

Perkembangan prostitusi meningkat drastis pada akhir abad ke-19, khususnya setelah 1870 ketika perekonomian kolonial terbuka bagi perusahaan swasta. Perluasan perkebunan, khususnya di wilayah yang berpenduduk sedikit di Jawa Barat, dan pertumbuhan industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menciptakan kebutuhan terhadap tenaga buruh yang menyebabkan terjadinya perpindahan laki-laki dari wilayah tersebut. Begitu juga dengan pembangunan jalan-jalan dan jalur kereta api yang menyambungkan kota-kota kecil dan besar serta yang menghubungkan kota-kota tersebut dengan wilayah perkebunan gula yang semakin meluas di pedalaman, semuanya

membutuhkan sejumlah besar buruh yang berpindah-pindah. Tatanan sosial di kota-kota kolonial juga kondusif untuk perkembangan prostitusi (Ingelsson, 2013: 214).

### **Perkembangan Prostitusi di Surabaya**

Surabaya yang pada pertengahan 1880 an memiliki pelabuhan terbuka di luarnya. Kapal pengangkut yang berlayar di lautan dapat mengisi dan membongkar muatan langsung di dermaga, sementara pelabuhan sebelah dalam melayani kapal-kapal layar yang sibuk di dalam jalur perdagangan antarpulau (Ingelsson, 2013: 3). Hal itulah yang kemudian membentuk segmentasi baru dalam kehidupan sosial masyarakat Surabaya, salah satunya adalah aktivitas prostitusi. Prostitusi yang berkembang di kawasan Surabaya banyak ditemukan di warung-warung kopi kecil di dekat pelabuhan dan kota pelabuhan tua; prostitusi jalanan dari kampung setempat, rumah-rumah bordil di pusat kota yang dimiliki oleh orang-orang Cina dan Jepang, rumah bordil kampung di pinggiran kota, pelayanan berbeda dari pelayan wanita Pribumi, pelayanan yang lebih beragam dari pelayan wanita Belanda yang tinggal di rumah untuk pemuda Belanda yang belum menikah, prostitusi Eropa di rumah bordil yang terorganisasi dan terakhir prostitusi homoseksual dan waria. Prostitusi dianggap sebagai fakta yang disesalkan dalam kehidupan kolonial. Terdapat populasi yang besar dari laki-laki yang tinggal sementara di kota-kota kolonial, baik orang Indonesia maupun Eropa. Pada akhir abad ke-19 di Surabaya terdapat dua rumah bordil terkenal yang dimiliki oleh orang Eropa dengan memperkerjakan wanita Eropa dan melayani kebutuhan laki-laki Eropa (Ingleson, 2013: 219).

Prostitusi dapat ditemukan di warung-warung kopi kecil dan kelab malam di Tanjung Perak yang menjadi favorit para pelaut dari Pangkalan Angkatan Laut Surabaya, baik orang Indonesia maupun Eropa karena hiburan para gadisnya, jogetnya dan minumannya. Para gadis harus tetap berada di sana sampai dini hari untuk menyambut tamu di pintu dan menjual minuman keras tetapi seringkali mereka membuat kesepakatan dengan para pelanggan untuk tetap menemani mereka hingga matahari terbit. Kebanyakan dari wanita ini tinggal di pusat Surabaya yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Tanjung Perak.

Perkembangan prostitusi yang ada di Surabaya selain menjamur di warung-warung kecil dan kelab malam yang ada di Tanjung Perak, prostitusi juga berkembang di jalanan. Prostitusi jalanan merupakan usaha yang lebih berbahaya karena polisi mengawasi dengan cermat para wanita yang berjalan sendiri pada malam hari. Upaya untuk mendapatkan pelayanan seksual dianggap sebagai pelanggaran di seluruh kota. Untuk menghindari penahanan, pelacur jalanan seringkali berjalan dengan seorang laki-laki Indonesia yang bertindak sebagai mucikari yang diam-diam mendekati calon pelanggan untuk menanyakan apakah mereka menginginkan seorang babu muda (Ingleson, 2013: 217).

Mengingat kanal merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang padat akan aktifitas manusia, maka prostitusi juga berkembang di kampung-

kampung pelosok Surabaya seperti halnya di wilayah kampung sepanjang kanal Banyu Urip, pelabuhan Tandes dan Kremil (Astuti dkk, 2016: 136). Pelacur tinggal dan bekerja di sekitar wilayah tersebut. Tempat tinggal dan tempat pelacuran hampir berdekatan sehingga pelacur dapat dengan mudah “menjajakan” jasanya. Akan tetapi pelacuran yang terjadi di rumah-rumah bordil tidak lagi murni milik orang pribumi, biasanya perilaku bisnis ini didominasi oleh orang-orang Cina dan Jepang. Wanita yang dijadikan pelacur adalah orang-orang Cina, dan wanita pribumi. Terdapat perbedaan tarif di antara keduanya. Biasanya wanita Cina akan memasang tarif lebih tinggi ketimbang wanita pribumi. Serta untuk dapat menyewa pelacur Cina, pelanggan harus memiliki koneksi dengan pemilik rumah bordil setempat (Simons dalam Sugiarti dkk, 2004: 39).

Rumah bordil lainnya yang dikelola oleh seorang Cina untuk para pelanggan Cina, dimana pelanggan non-Cina hanya diterima jika diperkenalkan langsung oleh seorang Cina. Hotel-hotel kecil ini menempatkan para wanita di kamar terpisah sehingga sang pengunjung bisa dengan nyaman pergi dari kamar satu ke kamar lainnya untuk menentukan pilihannya. Kebanyakan dari para wanita ini tidak hanya muda tetapi juga di bawah umur. Tarifnya termasuk biaya sewa sekitar dua Gulden 50 sen lebih tinggi dari pelacur pribumi (Ingleson, 2013: 218).

Pengawasan ketat terhadap pelaku prostitusi terjadi hanya pada jenis prostitusi legal. Sebenarnya ada juga jenis prostitusi ilegal yang berada di luar jangkauan pengawasan pihak keamanan dan kesehatann. Berdasarkan catatan sejarawan medis pada tahun 1852 tercatat tiga lokalisasi prostitusi legal di Surabaya yaitu Bandaran dengan 351 pelaku prostitusi, Sawahan dengan 93 pelaku prostitusi dan Nyamplungan dengan 11 pelaku prostitusi. Lokalisasi ini sering dianggap sebagai satu bentuk kapitalisasi prostitusi karena di dalamnya termuat legalisasi prostitusi dan penempatan prostitusi pada lokasi-lokasi khusus. Pelegalan sistem prostitusi juga tampak dari penggunaan istilah untuk para perempuan pelaku prostitusi yaitu perempuan publik (Amini, 2003: 110).

Peraturan untuk menertibkan para pelacur ini sebenarnya sudah diatur oleh Residen Surabaya pada tahun 1852 sebagai upaya untuk mengawasi penyebaran penyakit kelamin. Para pelacur diharuskan membatasi pekerjaan mereka di kampung-kampung ini jika tidak ingin ditahan selain itu mereka juga harus mempunyai kartu identitasnya. Semua pelacur di kampung ini terdaftar dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan. (Ingleson, 2013: 220). Kebijakan yang dibuat tampaknya tidak berpengaruh sama sekali dan akhirnya pemerintah pada tahun 1911 memberhentikan pemeriksaan kesehatan bagi pelacur oleh pegawai kesehatan pemerintah. Hukum kesusilaan masyarakat yang mengatur soal prostitusi juga ditiadakan. Selanjutnya masalah prostitusi akan menjadi masalah polisi dan tanggungjawab rumah sakit kota dan pemerintah regional.

Laporan pemerintah dan swasta di sepanjang abad ke-19 sampai akhir era kolonial menyatakan bahwa tingkat prostitusi di daerah koloni memang tinggi dan lebih tinggi dari kota-kota di Eropa selain itu. Hal ini merupakan faktor penting penyebab lebih tingginya tingkat terjadinya penyakit kelamin. Pada tahun 1941 setidaknya 15% populasi

di kota-kota yang lebih besar seperti Surabaya terinfeksi penyakit kelamin. Angka tersebut lebih tinggi dari kota-kota di Eropa pada masa itu (Ingleson, 2013: 229).

### Dampak Prostitusi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Ada beberapa dampak dari adanya kegiatan prostitusi diantaranya dari segi ekonomi, dengan adanya kegiatan prostitusi ada unsur yang dirasa bisa mendorong perkembangan perekonomian karena dengan adanya kegiatan prostitusi tersebut dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan mereka. Penghasilan tersebut setidaknya lebih banyak, mengingat para wanita tuna susila pada masa kolonial lebih banyak melayani para tentara-tentara koloni yang memiliki cukup uang. Selain para tentara dan masyarakat biasa juga banyak petinggi daerah yang menggunakan jasa para wanita tuna susila tersebut.

Dari segi kesehatan, dampak yang buruk bagi menularnya atau terjangkitnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelamin secara sangat cepat, seperti gonorrhoea, syphilis (lucs, rajasinga), dan juga penyakit lain misalnya seperti HIV/AIDS. Dampak dari maraknya praktik prostitusi adalah penyebaran PMS (penyakit menular seksual) dikalangan masyarakat. Sehingga pada masa itu PMS (penyakit menular seksual) menjadi penyakit berbahaya kedua setelah penyakit malaria di Hindia Belanda, sehingga mengakibatkan banyaknya korban akibat praktek prostitusi. Hal tersebut terjadi mengingat kurang tertibnya para pelacur yang tidak melakukan cek kesehatan secara berkala. Padahal prostitusi yang terdapat di sekitar pelabuhan ini sudah diatur dalam *Reglement tot wering van de schadelijk welke vit de prostitute vorrtvloeiien* tentang pengaturan rumah-rumah bordil oleh penguasa setempat, serta rumah-rumah bordil lainnya untuk konsultasi kesehatan (Sugiarti dkk, 2004: 37).

Tabel 1. Jumlah anggota militer Belanda yang menderita penyakit kelamin

Tahun	Jenis Penyakit Kelamin	
	Sipilis	Morbiveneris
1880	1013	8999
1881	1052	9406
1882	1290	8826
1883	1044	8187
1884	1150	8076
1885	1003	7311
1886	1040	8518

Sumber: *Burgerlijke Geneskudinge Dients van 260* dalam Fibiona, 2016: 108.

Seringkali para ibu pribumi memaksa anaknya yang berdarah campuran untuk menjadi pelacur atau memaksanya untuk mencuri. Hal demikian akan berpengaruh terhadap perilaku mental dan psikologis mereka yang menjadi liar, baik secara moral maupun seksual. Maka tidak mengherankan diantara mereka terdapat perempuan Indo yang melahirkan diusia 13 atau 14 tahun. Penyimpangan tersebut berdampak pada

terjadinya perilaku aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis terdidik maupun dukun bayi tradisional (Gayung, 2010: 143-146).

Selain itu, dampak psikis, fisik dan sosial sangat begitu kuat. Jumlah wanita yang notabene jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan beberapa dari mereka bekerja dan menikmati jasa prostitusi ini seolah-olah menunjukkan tingkat moralitas yang rendah. Akibatnya terjadi penyebaran penyakit kelamin dan rusaknya tatanan sosial. Salah satu motif yang kerap dijadikan alasan oleh wanita yang bekerja di lingkungan prostitusi ini adalah faktor ekonomi. Saat sang suami tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidup, maka sang istri rela untuk menjual diri dengan menjadi pemuas nafsu laki-laki lainnya (Fibiona, 2016: 109). Dampak dari segi keamanan, keberadaan tempat prostitusi tersebut sebenarnya sangat rawan dengan tindakan kriminalitas. Meningkatkan rumah bordil tidak hanya menjajakan jasa seks akan tetapi juga menjual minuman beralkohol, sehingga tindakan kriminalitas sering terjadi di lokasi tersebut terutama perkelahian antar pengunjung yang disebabkan karena sebagian dari mereka sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol.

## KESIMPULAN

Penyebab munculnya prostitusi, sebagian besar dikarenakan oleh adanya desakan pada keadaan ekonomi. Sejak Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada 1906, kota ini dengan cepat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejak era liberalisasi ekonomi pada 1870 Surabaya telah menjadi salah satu tujuan utama para pendatang dari pedesaan yang ingin mengadu nasib. Akan tetapi sebagian besar mereka yang datang ke Surabaya bekerja sebagai pekerja "otot" atau kuli pelabuhan. Maka bagi mereka yang sudah berkeluarga dan kehidupannya masih di bawah garis kesejahteraan, sang istri akan berusaha untuk mencari jalan lain untuk mencukupi kebutuhan itu. Salah satunya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang wanita pada saat itu adalah bekerja dalam bidang prostitusi karena pekerjaan ini dinilai tidak membutuhkan keahlian khusus, dari pekerjaan ini dinilai juga dapat menghasilkan banyak uang.

Prostitusi mempunyai berbagai macam dampak seperti dampak dalam bidang perekonomian dengan adanya kegiatan prostitusi ada unsur yang dianggap dapat mendorong perkembangan perekonomian. Dari segi kesehatan, dampak yang buruk bagi menularnya atau terjangkitnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelamin. Praktik prostitusi ini juga berpotensi merusak tatanan sosial yang ada, sehingga kemudian terjadi segregasi moral di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi mengingat kesejahteraan masyarakat pribumi yang pada saat itu masih jauh berada di bawah sebagai salah satu dampak dari praktik kolonial. Maka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seorang wanita yang tidak dapat terserap dalam bidang pekerjaan yang layak akan memilih jalan sendiri demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

**DAFTAR RUJUKAN****Buku dan Jurnal**

- Amini, M. 2003. Kehidupan Sosial Perempuan di Tengah-Tengah Pluralitas Masyarakat Surabaya pada Awal Abad ke-20. *Lembaran Sejarah*. 5(1): 101-128.
- Astuti dkk. 2016. *Pembangunan Pelabuhan Surabaya dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Sekitarnya Pada Abad XX*. Yogyakarta: Kemendikbud Direktorat Jendral Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Boomgard, P. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan KITLV.
- Bonger, W A. 1954. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Dewi, H. E. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Dick, H. W. 2000. Industrialisasi Abad ke-19, Sebuah Kesempatan yang Hilang? Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia, Berbagai Tantangan Baru* disunting oleh J. Thomas Lindblad. Jakarta: LP3ES.
- Faucault, M. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fibiona, I. 2016. Prostitusi dan Perdagangan Wanita: Praktik Eksploitasi Wanita di Jawa dan Sumatra, Abad XIX-Awal Abad XX. *Jurnal Patrawidya*. 17(2): 96-115.
- Gayung, K. 2010. *Perilaku Aborsi di Jawa Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Ingleson, J. 2013. *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan Di Jawa Masa Kolonial*. Depok: Komunitas Bambu
- Ingleson, J. 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Margana, S & Nursam. 2010. *Kota-Kota di Jawa (Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial)*. Yogyakarta: Ombak.
- Nas, P. J. M. 2007. *Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Seodjono. 1977. *Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Sugiati, 2008. *Wanita "P" Surabaya: Lokalisasi Tambak Rejo, Bangun Rejo, Kremil, dan Sidoresmo Tahun 1953-1974*. Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya.
- Sugiarti E dkk. 2004. *Pelacuran Masa Kolonial di Pelabuhan Tanjoeng Perak Soerabaya*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Surabaya.
- Sztompka, P. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.